SKRIPSI

PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOTA PONTIANAK

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Angela Putri Megasari

NIM. E1031221023

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

SKRIPSI

PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOTA PONTIANAK

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:
Angela Putri Megasari
NIM.E1031221023

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOTA PONTIANAK

Tangung Jawab Yuridis Pada:

Angela Putri Megasari

NIM.E1031221023

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Netty Herawati, M.Si
NIP.196510291990022001

Tanggal : 27 April 2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si
NIP.198306272006042020

Tanggal : 24-04-26

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOTA PONTIANAK

Oleh:
Angela Putri Megasari
NIM. E1031221023

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : 11 juni 2026
Waktu : 11.00
Tempat : Ruang Sidang

Tim Penguji

Ketua

Dr. Netty Herawati, M.Si
NIP. 196510291990022001

sekretaris

Rulida Yunarsih, S.IP, M.Si
NIP. 198306272006042020

Penguji Pertama

Dr. Nurfitri, Nugrahaningsih S.IP, M.Si
NIP. 197408102002122002

Penguji Pendamping

Farah Devi Andriani, S.Kom,M.MSI
NIP. 199112302025212053

Disahkan Oleh:
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlah, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam pengelolaan informasi publik melalui website PPID yang masih menghadapi masalah berupa kurang optimalnya koordinasi antar PPID utama dan PPID pelaksana, keterlambatan pembaruan informasi, serta keterbatasan sumber daya manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Diskominfo dalam fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan sesuai regulasi keterbukaan informasi publik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian adalah kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Diskominfo, Kabid IKP, Ketua dan anggota PPID, serta masyarakat pengguna website. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website PPID telah berfungsi sebagai media pelayanan informasi publik yang memudahkan akses masyarakat secara daring. Diskominfo juga telah melaksanakan fungsi pengaturan melalui regulasi dan koordinasi OPD, fungsi pelayanan melalui sistem permohonan online, fungsi pemberdayaan melalui Bimtek dan workshop, serta fungsi pembangunan melalui pengembangan infrastruktur dan fitur digital. Pembahasan menunjukkan bahwa meskipun implementasi sudah berjalan cukup baik, masih terdapat kendala seperti keterbatasan SDM, koordinasi yang belum optimal, serta perbedaan kapasitas antar OPD yang mempengaruhi kecepatan layanan informasi. Selain itu, pengembangan sistem website masih perlu ditingkatkan agar lebih responsif, inklusif, dan mudah diakses masyarakat. Kesimpulannya, peran Diskominfo Kota Pontianak dalam pengelolaan PPID sudah cukup baik dalam mendukung keterbukaan informasi publik, namun masih diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan sistem secara berkelanjutan agar pelayanan informasi publik lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Kata kunci**:** Pengelolaan Informasi Publik, Transparansi, Fungsi Pemerintahan

ABSTRACT

Public information transparency is a form of government service aimed at fulfilling the public's right to obtain information in an open, timely, and easily accessible manner. The management of public information through the website of the Pontianak City Information and Documentation Management Officer (PPID) remains suboptimal, as evidenced by limitations in human resources, facilities and infrastructure, budget, and coordination between the Primary PPID and the Executive PPID in the provision and updating of public information. This study aims to analyze the government's role in managing public information through the Pontianak City PPID website. This study employed Ryaas Rasyid's theory of government functions, which encompasses regulatory, service, empowerment, and development functions. It used a qualitative, descriptive approach. Data collection techniques included interviews, observations, documentation, and literature review, while data analysis involved data reduction, data presentation, and conclusion. The results indicate that the Pontianak City Communication and Information Technology Agency has implemented the four government functions, regulation, empowerment, and development, through the utilization and development of the PPID website as a technology-based medium for public information services. However, the implementation of these four functions has not yet been optimal due to constraints such as limited human resources, facilities and infrastructure, budget, and coordination among local government agencies. The Pontianak City Government is advised to enhance human resource capacity by increasing IT staff, strengthening coordination between the Primary PPID and the Executive PPID, developing supporting facilities and infrastructure, and optimizing budgetary support to improve the quality of public information management through the Pontianak City PPID website.

Keywords: Public Information Management, Transparency, Government Functions

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh peneliti berjudul “Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Pengelolaan Informasi Publik Melalui Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pontianak.” Peneliti menetapkan judul ini karena dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik melalui website PPID masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola informasi publik, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah dalam menyediakan dan memperbarui informasi publik pada website PPID. Selain itu, masih terdapat perangkat daerah yang belum secara aktif memperbarui informasi yang tersedia pada website PPID sehingga menyebabkan informasi yang disajikan belum sepenuhnya aktual dan lengkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan informasi publik melalui website PPID masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan informasi yang lebih baik kepada masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Pengelolaan Informasi Publik Melalui Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pontianak?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam pengelolaan informasi publik melalui website PPID. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsi pemerintahan menurut Ryaas Rasyid yang terdiri dari empat indikator yaitu fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, dan

fungsi pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam mengenai peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan informasi publik melalui website PPID. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Hasil penelitian yang didasarkan pada penggunaan teori fungsi pemerintahan menurut Ryaas Rasyid menunjukkan bahwa peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam pengelolaan informasi publik melalui website PPID telah dilaksanakan melalui empat fungsi utama. Pada fungsi pengaturan, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menjalankan perannya dengan menetapkan berbagai kebijakan dan pedoman yang berkaitan dengan pengelolaan informasi publik serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyediaan informasi publik. Pada fungsi pelayanan, website PPID telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik secara cepat dan mudah melalui layanan berbasis daring. Pada fungsi pemberdayaan, keberadaan website PPID memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi publik sehingga mendorong terciptanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, pada fungsi pembangunan, pengelolaan website PPID merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Namun demikian, dalam

pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pembaruan informasi oleh perangkat daerah, serta perlunya peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan website PPID.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan beberapa saran. Dalam pelaksanaan fungsi pengaturan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak diharapkan dapat lebih memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah, sehingga setiap OPD dapat lebih aktif dan konsisten dalam menyediakan serta memperbarui informasi pada website PPID. Dengan koordinasi yang lebih baik, pengelolaan informasi publik dapat berjalan lebih terarah. Dalam pelaksanaan fungsi pelayanan, perlu adanya peningkatan kualitas layanan informasi publik, terutama dalam hal pembaruan informasi secara berkala dan peningkatan respons terhadap permohonan informasi dari masyarakat, sehingga informasi yang disajikan lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan. Pada fungsi pemberdayaan, perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dalam bentuk sosialisasi dan peningkatan pemahaman, baik kepada aparatur maupun masyarakat, agar pemanfaatan website PPID dapat lebih maksimal dan tidak hanya diketahui oleh sebagian pihak saja. Selain itu, pada fungsi pembangunan, perlu dilakukan pengembangan sistem serta sarana dan prasarana pendukung secara berkelanjutan, disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga pengelolaan website PPID dapat berjalan lebih efektif dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan informasi publik.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Angela Putri Megasari

Nomor Mahasiswa : E1031221023

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 23 April 2026
Yang membuat pernyataan



Angela Putri Megasari
E1031221023

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Segala perkara dapat kutanggung didalam Dia,
yang memberi kekuatan kepadaku"
Filipi 4:13

Skripsi ini Penulis persembahkan dengan penuh rasa bangga dan cinta yang tulus kepada orang-orang terkasih yang telah mendukung Penulis dengan caranya masing-masing:

1. Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena berkat, kebaikan, anugerah dan kasih setia-Nya dalam hidup saya, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada kedua orang tua saya, terimakasih untuk semua uang yang dikeluarkan untuk pendidikan, kebutuhan sehari-hari, baju yang nyaman, makan yang sesuai selera, dan masih banyak kebahagiaan yang telah diusahakan yang tidak bisa disebutkan. *For my parents thank you so much!* Semoga rejeki kalian sederas hujan, semengalir air terjun dan suatu hari bisa membalas semua apa yang kalian berikan serta menjadi kebanggaan bagi kalian.
3. Nenek saya tercinta, yang selalu menjadi sumber doa, kasih sayang, dan kekuatan dalam setiap langkah hidup saya. Terima kasih atas cinta yang tidak pernah putus, perhatian yang tulus, serta segala pengorbanan yang telah diberikan tanpa pamrih. Doa nenek adalah kekuatan terbesar yang

selalu mengiringi perjalanan saya hingga sampai pada titik ini, semoga karya kecil ini dapat menjadi kebanggaan.

4. Keempat saudara saya, Almadika Yogi Pratama, Oktavianus Dwi Yando, Suhardianto, Yosua Charlie, terimakasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu di berikan kepada saya, Kehadiran kalian menjadi bagian penting yang selalu memberikan motivasi bagi saya untuk terus maju dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.
5. Kakak Ipar saya Felicia Nadira, terimakasih atas segala perhatian, dukungan, dan kebaikan yang selalu diberikan, baik secara materi maupun non-materi. Terima kasih telah hadir sebagai bagian dari keluarga yang selalu memberikan semangat, membantu dalam berbagai hal, serta menjadi sosok yang peduli dalam setiap proses yang saya jalani. Dukungan yang diberikan, sekecil apa pun, sangat berarti dan menjadi salah satu faktor yang membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan anugerah, karunia, dan hikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul *"Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Pengelolaan Informasi Publik Melalui Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Pontianak."* Tujuan disusunnya skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam melaksanakan penelitian guna menyelesaikan studi pendidikan sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.

Selanjutnya, peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Hal tersebut karena hasil yang dicapai melalui skripsi ini merupakan langkah awal dalam proses pembelajaran dan perjalanan panjang peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Sepanjang proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan saran, masukan, serta dorongan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si.**,** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan.
2. Dr. Netty Herawati, M.Si.**,** selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Rulida Yuniarsih, S.IP., M.Si.**,** selaku Dosen Pembimbing Pendamping, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang juga telah banyak membantu dan memberikan saran yang konstruktif selama penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Nurfitri, Nugrahaningsih S.IP, M.Si selaku penguji utama dan Farah Devi Andriani, S.Kom, M.MSI selaku penguji pendamping yang telah banyak memberikan masukan guna kesempurnaan dalam skripsi ini.
5. Pembantu Dekan dan Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura**,** yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan wawasan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah membantu dalam proses administrasi selama penyusunan skripsi ini.
7. Edy Purwanto, S.E., M.E selaku Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika kota Pontianak , Vivi Salmiarni, S.Sos.,M.A.P selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, M. Suryadin SE. MM selaku ketua tim PPID, Fitri Fidyasari, S.I.Kom selaku anggota PPID utama. serta masyarakat yang menjadi informan penelitian atas kesediaannya memberikan informasi, data, dan berbagai masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh peneliti yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya penyusunan usulan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan di masa mendatang. Semoga segala bentuk bantuan, dukungan, dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa**.**

Pontianak, 16 April 2026

Angela Putri Megasari

E1031221023

DAFTAR ISI

halaman

Skripsi .....
LEMBAR PERSETUJUAN..... ii
HALAMAN PENGESAHAN..... iii
ABSTRAK..... iii
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI..... xiii
DAFTAR TABEL..... xv
DAFTAR BAGAN xvi
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang penelitian 1
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian..... 11
1.3. Fokus Penelitian..... 11
1.4. Rumusan Masalah..... 12
1.5. Tujuan Penelitian 12
1.6. Manfaat Penelitian 12
1.6.1. Manfaat Teoritis 12
1.6.2. Manfaat Praktis..... 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 15
2.1. Definisi Konsep 15
2.1.1. Peran Pemerintah..... 15
2.1.2. Pengelolaan Informasi Publik..... 18
2.2. Teori..... 21
2.2.1. Fungsi 21
2.2.2. Fungsi Pemerintahan 23
2.2.3. Indikator Fungsi Pemerintahan..... 26
2.3. Hasil Penelitian Yang relevan..... 29
2.4. Alur Pikir Penelitian 31
2.5. Pertanyaan Penelitian..... 35
BAB III METODE PENELITIAN..... 36
3.1. Jenis Penelitian..... 36
3.2. Langkah - Langkah Penelitian 37
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 38
3.3.1. Lokasi Penelitian 38
3.3.2. Waktu Penelitian 38
3.4. Subjek dan Objek Penelitian..... 39
3.4.1. Subjek Penelitian..... 39
3.4.2. Objek Penelitian 41
3.5. Teknik Pengumpulan Data..... 41
3.6. Instrumen dan Alat Pengumpulan Data 44
3.7. Analisis Data..... 46
3.7.1. Teknik Analisis Data 46

3.7.2. Keabsahan Data 49
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 52
4.1. Gambaran Umum DISKOMINFO Kota Pontianak 52
4.1.1. Sejarah Diskominfo Kota Pontianak 52
4.1.2. Visi dan Misi Kota Pontianak..... 54
4.1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DISKOMINFO Kota Pontianak 55
4.1.4. Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utama 61
4.1.5. Website PPID Kota Pontianak..... 62
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 63
5.1. Deskripsi Hasil Penelitian..... 63
5.2. Pembahasan..... 64
5.2.1. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Fungsi Pengaturan Pengelolaan Informasi Publik melalui Website PPID 64
5.2.2. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Fungsi Pelayanan Pengelolaan Informasi Publik melalui Website PPID 78
5.2.3. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Fungsi Pemberdayaan Pengelolaan Informasi Publik melalui Website PPID 108
5.2.4. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Fungsi Pembangunan Pengelolaan Informasi Publik melalui Website PPID 126
BAB VI PENUTUP 146
6.1. Simpulan 146
6.2. Saran 154
6.3. Keterbatasan Penelitian..... 158
DAFTAR PUSTAKA 160
DAFTAR LAMPIRAN..... xix

DAFTAR TABEL

Tabel		*halaman*
1.1	Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Alokasi Anggaran	5
1.2	Alokasi Anggaran Pengelolaan PPID Kota Pontianak Tahun 2024	6
2.1	Penelitian yang Relevan	29
3.1.	Waktu Penelitian	39
5.1	Data Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Kalimantan Barat terhadap PPID Kota Pontianak.....	97

DAFTAR BAGAN

Bagan *halaman*

2.1 Alur Pikir Penelitian……..... 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

1.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin..... 8

1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan 8

4.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak 61

5.1 Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 49 Tahun 2018..... 70

5.2 Tampilan Halaman Utama Website PPID Kota Pontianak 80

5.3 Fitur Permohonan Informasi pada Website PPID Kota Pontianak..... 93

5.4 Alur Pelayanan Permohonan Informasi pada Website PPID Kota Pontianak..... 94

5.6 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Bimtek..... 110

5.7 Menu Aksebilitas 132

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *halaman*

1. Biodata Penulis xix
2. Panduan Wawancara xxi
3. Panduan Observasi xxix
4. Surat Tugas Penelitian xxx
5. Daftar Nama Subjek Penelitian xxxi
6. Dokumentasi Penelitian xxxii

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang penelitian

Era modern saat ini, kebutuhan akan informasi menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, maupun pemerintahan. Informasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengetahuan, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, sarana peningkatan partisipasi masyarakat, serta alat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa perubahan cukup besar dalam cara masyarakat mengakses, mengelola, dan memanfaatkan informasi.

Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 28F yang menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk mencari, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Untuk memperkuat jaminan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur kewajiban badan publik dalam menyediakan dan menyampaikan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana. Dalam pelaksanaannya di tingkat daerah, tanggung jawab tersebut berada pada

perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang komunikasi dan informatika, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pelaksanaan kebijakan tersebut diarahkan melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam pelayanan informasi, penataan dokumentasi, serta publikasi informasi publik secara daring melalui website resmi. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan acuan yang sangat jelas kepada warga negara tentang tata cara memperoleh informasi dari badan publik. Melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik masyarakat dapat memantau setiap kebijakan, aktivitas, maupun anggaran badan-badan publik berkaitan dengan penyelenggaraan negara maupun yang berkaitan dengan kepentingan publik lainnya.

Dalam mendukung terselenggaranya keterbukaan informasi publik, PPID memanfaatkan website sebagai media pelayanan informasi berbasis elektronik. Website PPID berfungsi sebagai sarana penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, mudah, dan transparan. Selain itu, website PPID juga digunakan sebagai media pelayanan permohonan informasi dan pengajuan permohonan secara berani. Tujuan utama website PPID adalah mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi publik, meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung terwujudnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Di Kota Pontianak, urusan keterbukaan informasi publik dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Diskominfo merupakan

perangkat daerah yang memiliki peran sebagai unsur pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, dan pengelolaan informasi publik. Di Kota Pontianak, pengelolaan informasi publik berada di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebagai PPID Utama. Secara regulatif, kedudukan dan tugas Diskominfo diatur dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam ketentuan tersebut, Diskominfo memiliki tugas membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, termasuk pengelolaan informasi publik. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

Sebagai PPID Utama, Diskominfo memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan PPID Pelaksana di setiap perangkat daerah, menyediakan dan mendokumentasikan informasi publik, serta memberikan layanan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media yang tersedia, termasuk website resmi PPID. Dengan demikian, Diskominfo tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya keterbukaan informasi publik di Kota Pontianak. Secara kelembagaan, struktur PPID di Kota Pontianak telah dibentuk melalui Surat Keputusan yang menetapkan tim PPID Utama dan PPID Pelaksana di masing-masing perangkat daerah. Website PPID juga telah tersedia sebagai sarana

pelayanan informasi publik secara daring. Namun secara empiris, pelaksanaan pengelolaan website tersebut masih menghadapi sejumlah kendala.

Berdasarkan Laporan PPID Kota Pontianak Tahun 2024, keterbatasan alokasi anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam optimalisasi pengelolaan PPID, karena anggaran untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kota Pontianak dalam beberapa tahun terakhir mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan *refocusing* anggaran pemerintah daerah. Sementara itu, berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024, pengelolaan informasi publik dilaksanakan melalui Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan pagu anggaran sebesar Rp638.003.540. Program tersebut meliputi berbagai kegiatan, antara lain pengelolaan konten dan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, serta kemitraan dengan para pemangku kepentingan. Apabila dicermati lebih lanjut, alokasi anggaran yang secara langsung mendukung pengelolaan PPID masih sangat terbatas.

Tabel 1.1
Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Alokasi Anggaran

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran (Rp)
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	persen	70	638.003.540
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah sarana/media informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan dipublikasikan	media	13	638.003.540
3	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media	dokumen	12	235.866.500
4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media	dokumen	2	36.840.000
5	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	dokumen	12	68.857.640
6	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media	Layanan	4	149.070.000
7	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah dokumen hasil kemitraan	Dokumen	2	76.435.600
8	Penguatan Tata Kelola Komisi	Jumlah dokumen hasil	dokumen	1	29.151.800

	Informasi di Daerah (PPID)	penguatan tata kelola			

Sumber: LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024

Berdasarkan Laporan PPID Kota Pontianak Tahun 2024, Kegiatan pengelolaan PPID dianggarkan sebesar Rp25.997.800 dari total anggaran Program Informasi dan Komunikasi Publik yang terdiri dari belanja alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp12.247.800 dan belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp13.750.000. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan administratif seperti penyediaan ATK, belanja cetak formulir dan SOP, konsumsi rapat, serta koordinasi dengan PPID Pelaksana.

Tabel 1.2
Alokasi Anggaran Pengelolaan PPID Kota Pontianak Tahun 2024

Program/Kegiatan	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
Informasi dan Komunikasi Publik – Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Total Anggaran Pengelolaan PPID	25.997.800
	Belanja ATK (pakai habis)	12.247.800
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.750.000

Sumber: Laporan PPID Kota Pontianak Tahun 2024.

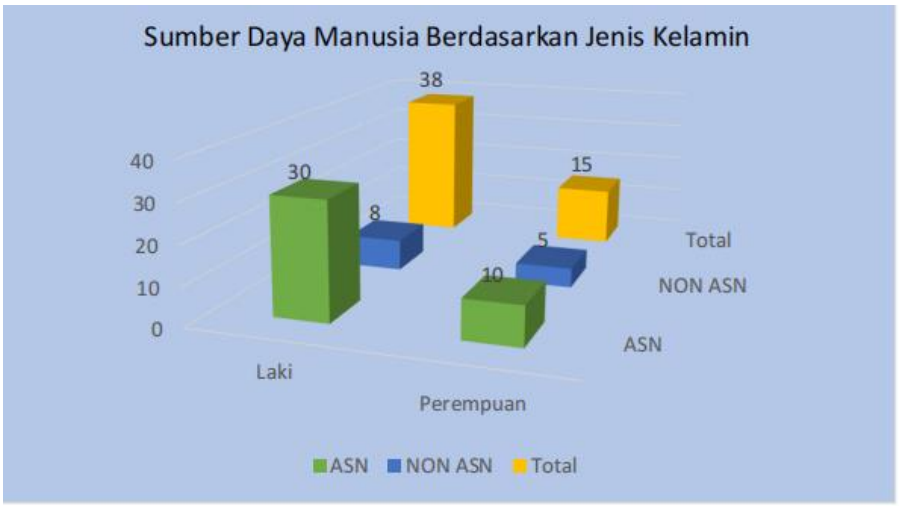
Selain itu permasalahan juga terlihat pada aspek sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam mendukung pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Pada tahun 2024, PPID Kota Pontianak secara umum telah memiliki fasilitas pendukung seperti perangkat komputer, ruang pelayanan informasi, jaringan internet, serta website PPID. Namun, ketersediaan sarana dan prasarana tersebut belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik secara optimal**,** khususnya

dari sisi kecukupan dan spesifikasi peralatan komputer, ketersediaan tempat pelayanan informasi di tingkat OPD, serta pengembangan dan optimalisasi website PPID sebagai media utama pelayanan informasi publik berbasis digital.

Permasalahan lain juga terlihat pada aspek sumber daya aparatur (SDA) dalam pengelolaan PPID. Berdasarkan Laporan PPID Kota Pontianak Tahun 2024, pelayanan informasi publik secara operasional hanya dijalankan oleh dua orang petugas, yaitu petugas pelayanan informasi dan dokumentasi serta operator website PPID. Padahal, secara struktural Pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah, dengan jumlah 34 orang pada PPID Utama dan 30 orang pada PPID Pembantu. Besarnya jumlah aparatur dalam struktur tersebut belum sebanding dengan jumlah aparatur yang terlibat langsung dalam pelayanan teknis, khususnya dalam pengelolaan, pembaruan, dan penyajian informasi pada website PPID. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan SDA dalam pengelolaan PPID tidak hanya terletak pada jumlah aparatur, tetapi juga pada beban kerja dan efektivitas pemanfaatan aparatur.

Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan data kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2024, Diskominfo didukung oleh 40 orang ASN dan 13 orang tenaga kontrak atau jasa orang perorangan.

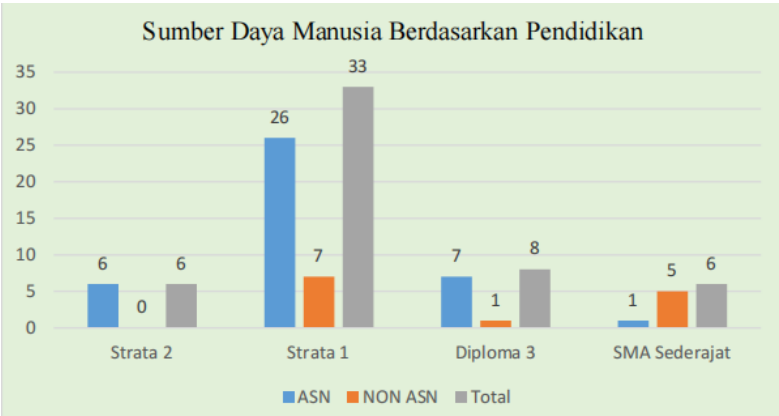
Gambar 1.1
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin



Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2024

Dari jumlah ASN tersebut, sebanyak 6 orang berpendidikan S2, 27 orang berpendidikan S1, dan 7 orang berpendidikan diploma. Sementara itu, tenaga non-ASN terdiri dari 7 orang lulusan S1, 1 orang lulusan D3, serta 5 orang lulusan SMA/sederajat. Komposisi ini menunjukkan bahwa secara jumlah maupun tingkat pendidikan, Diskominfo Kota Pontianak memiliki sumber daya aparatur yang relatif memadai.

Gambar 1.2
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan



Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2024

Selain itu, berdasarkan hasil permintaan informasi kepada PPID Kota Pontianak, diketahui bahwa pengelola PPID masih merangkap tugas kehumasan lainnya. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan waktu, fokus, dan proaktivitas aparatur dalam menjalankan pelayanan informasi dan dokumentasi secara optimal, khususnya dalam pengelolaan website PPID. Akibatnya, pembaruan informasi publik melalui website belum dapat dilakukan secara konsisten serta belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara struktur kelembagaan yang telah dibentuk dengan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Dalam perspektif administrasi publik, kondisi ini dapat dianalisis melalui konsep peran pemerintah daerah yang diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Secara teoritis, fungsi pemerintahan daerah dapat dibagi ke dalam empat fungsi utama, yaitu fungsi pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan. Fungsi pelayanan berkaitan dengan penyediaan layanan informasi yang mudah diakses dan responsif; fungsi pembangunan berkaitan dengan dukungan anggaran, sarana, dan pengembangan sistem; fungsi pemberdayaan berkaitan dengan peningkatan kapasitas aparatur dan optimalisasi sumber daya manusia; sedangkan fungsi pengaturan berkaitan dengan penyusunan kebijakan, koordinasi, serta pengawasan pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan perangkat daerah.

Apabila dikaitkan dengan kondisi di Kota Pontianak, pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal dalam pengelolaan website PPID. Dari sisi pelayanan, pembaruan informasi dan

kecepatan respons masih perlu ditingkatkan. Dari sisi pembangunan, dukungan anggaran khusus untuk pengelolaan PPID masih relatif terbatas. Dari sisi pemberdayaan, jumlah dan kapasitas sumber daya manusia belum sepenuhnya memadai. Dari sisi pengaturan, koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana masih bergantung pada inisiatif masing-masing perangkat daerah.

Dengan demikian, permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan website, tetapi juga menyangkut pelaksanaan peran Diskominfo sebagai aktor utama dalam menjamin keterbukaan informasi publik di Kota Pontianak. Analisis terhadap peran tersebut menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana fungsi-fungsi pemerintahan telah dijalankan secara efektif dalam pengelolaan website PPID.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi dan struktur kelembagaan telah tersedia, pelaksanaan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam pengelolaan informasi publik melalui website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaanya. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta koordinasi antar perangkat daerah menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam bagaimana peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam pengelolaan informasi publik melalui website PPID dijalankan, serta sejauh mana pelaksanaan peran tersebut mampu

mendukung terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Pontianak.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian ini terdiri atas:

1. Kurangnya Koordinasi antar PPID utama dan PPID pelaksana sehingga proses penyampaian dan pembaruan informasi publik kepada masyarakat sering mengalami keterlambatan.
2. Masyarakat masih mengalami kendala dalam memperoleh informasi publik secara cepat dan mudah melalui website PPID, baik karena keterlambatan pembaruan informasi maupun keterbatasan akses terhadap informasi yang dibutuhkan.

1.3. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam pengelolaan Informasi Publik Melalui Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**.** Penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana Diskominfo melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPID Utama dalam menyediakan, memperbarui, dan menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat. Penelitian ini mengacu pada pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika**,** sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan fokus penelitian sebelumnya yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam pengelolaan Informasi Publik melalui Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) belum optimal?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan Informasi Publik melalui website PPID di Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 116 Tahun 2021.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada penelitian ini setidaknya terdapat 2 manfaat yang di harapkan yaitu :

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya pada kajian keterbukaan informasi publik dan *e-government.* Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademis dalam memahami peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam

pengelolaan website PPID sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

1.6.2. Manfaat Praktis

Menurut Nazir (2014), manfaat praktis penelitian adalah kontribusi langsung dari hasil penelitian terhadap penyelesaian masalah nyata di masyarakat atau terhadap peningkatan efektivitas lembaga yang menjadi objek penelitian. Dengan kata lain, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang bersifat aplikatif, bukan hanya konseptual.

1) Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak**,** hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan website PPID. Penelitian ini dapat memberikan masukan terkait aspek pengelolaan, pelayanan informasi publik, serta strategi sosialisasi kepada masyarakat agar pemanfaatan website PPID dapat berjalan lebih optimal sebagai media pelayanan informasi publik berbasis digital.
2) Bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah (OPD) terkait**,** hasil penelitian ini dapat menjadi dasar empiris dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan kebijakan dan pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran untuk mendukung keterbukaan informasi publik.
3) Bagi Dunia Akademik dan Mahasiswa**,** penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik dalam bidang ilmu pemerintahan dan administrasi

publik, khususnya terkait peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pelayanan informasi publik. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengkaji implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintah daerah.

4) Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai hak warga negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan website PPID sebagai sarana memperoleh informasi publik secara mudah, transparan, dan akuntabel.